

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PROVINSI PAPUA BARAT

MENURUT PENGELUARAN

2015-2019



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI PAPUA BARAT
MENURUT PENGELUARAN
2015-2019**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT
PENGELUARAN, 2015 - 2019**

ISSN : 2089 - 998x
Nomor Publikasi : 91550.2003
Katalog BPS : 9302020.91
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 73 halaman

Naskah:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Penyunting:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Gambar Kulit:
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Diterbitkan Oleh:
© Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Dicetak Oleh:
CV. Nario Sari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO PROVINSI PAPUA BARAT
MENURUT PENGELUARAN, 2015 - 2019**

Anggota Tim Penyusun:

Penanggung jawab umum : Maritje Pattiwaellapia SE, M.Si

Penanggung jawab teknis : Achmad Ali SST, M.Agb

Penulis : Putu Krishnanda Supriyatna, S.ST

Editor : Mary Tri Supriyatningsih, S.ST

Pembuat desain cover : Harianto Palanu S.Stat.

<https://papuabarat.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran /*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Manokwari, 30 April 2020

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Provinsi Papua Barat,



Maritje Pattiwaellapia SE, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	2
1.2. Kegunaan Statistik PDRB.....	4
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	6
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	9
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	12
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	14
2.5 Perubahan Inventori	18
2.6 Ekspor Impor	21
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI PAPUA BARAT BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014-2018.....	25
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Papua Barat Menurut Pengeluaran	26
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	31
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	36
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah.....	37
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	40
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	41
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	42

3.8	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	43
3.9	Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	45
BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014-2018	47
4.1	PDRB (Nominal)	48
4.2	Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor	49
4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	50
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	50
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	51
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	52
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	53
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	53
4.9	Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	55
4.10	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	56
BAB V	PENUTUP	59
	LAMPIRAN	62
	DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)	26
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Papua Barat Tahun Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)	27
Tabel 3.3.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2018 (Persen)	29
Tabel 3.4.	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019 (Persen).....	30
Tabel 3.5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019.....	30
Tabel 3.6.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat, Tahun 2015-2019.....	32
Tabel 3.7.	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat, Tahun 2015-2019 (Persen)	33
Tabel 3.8	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat, Tahun 2015-2019 (Persen)	34
Tabel 3.9	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat, Tahun 2015-2019 (Persen)	35
Tabel 3.10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Papua Barat, Tahun 2015-2019.....	37
Tabel 3.11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Papua Barat, Tahun 2015-2019.....	38
Tabel 3.12	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Papua Barat, Tahun 2015-2019.....	39
Tabel 3.13	Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Papua Barat, Tahun 2015-2019.....	40
Tabel 3.14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019.....	41
Tabel 3.15	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Papua Barat, Tahun 2015-2019.....	43
Tabel 3.16	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Papua Barat, Tahun 2015-2019.....	44

Tabel 3.17	Tabel 17. Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Antar Daerah Provinsi Papua Barat, Tahun 2015 – 2019.....	46
Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Papua Barat, Tahun 2015-2019	48
Tabel 4.2	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2015-2019.....	49
Tabel 4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2015-2019.....	50
Tabel 4.4	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Papua Barat, Tahun 2015-2019.....	51
Tabel 4.5	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2015-2019.....	52
Tabel 4.6	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019.....	52
Tabel 4.7	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Papua Barat, Tahun 2015-2019.....	53
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019.....	54
Tabel 4.9	Rasio Perdagangan Internasional, Provinsi Papua Barat, Tahun 2015-2019.....	55
Tabel 4.10	Incremental Capital Output Ratio, Provinsi Papua Barat, Tahun 2015-2019.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Papua Barat, Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah)	28
---	----

<https://papuabarat.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Papua Barat (Milyar Rp)	65
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Papua Barat (Milyar Rp)..	66
Lampiran 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Papua Barat (Persen)	67
Lampiran 4.	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Provinsi Papua Barat.....	68
Lampiran 5.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, Menurut Pengeluaran Provinsi Papua Barat (Persen).....	69
Lampiran 6.	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Provinsi Papua Barat (Persen)	70

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalan, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

- c. Menurut Pendekatan Pengeluaran**, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Peralengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
 Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (adjustment). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (adjustment) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu; Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;

- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).

Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.

Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir

konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung

unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
 - d. Laporan keuangan perusahaan.
 - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
 - f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
 - g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Pengalihan (migas dan non-migas).
 - h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.

- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

3. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB *adh Berlaku*. Untuk memperoleh nilai *adh Konstan* adalah dengan *men-deflate* PMTB (*adh Berlaku*) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB *adh Konstan* dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB *adh Konstan* terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB *adh Berlaku*, nilai PMTB *adh Konstan* tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB *adh Konstan* di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB *adh Berlaku* diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB *adh Konstan* adalah dengan cara *men-deflate* PMTB *adh Berlaku* dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB *adh Berlaku* untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan *adh Berlaku* dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB *adh Konstan*-nya diperoleh dengan *men-deflate* nilai *adh Berlaku* dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB *adh Berlaku* diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk *adh Konstan* diperoleh dengan *men-deflate* nilai *adh Berlaku* dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.

Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan

posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

ii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai,

gula pasir, dan gandum.

iii Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb:

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan *menginflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. *mendeflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6. EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impur dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat

memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Import Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented trasnsaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://papuabarat.bps.go.id>

<https://papuabarat.bps.go.id>

BAB III

**TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI
PAPUA BARAT BERDASARKAN PDRB
PENGELUARAN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2015-2019**



Perubahan struktur ekonomi Provinsi Papua Barat akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2015 s.d 2019, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Papua Barat digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGEGAT PDRB PAPUA BARAT MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Papua Barat menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama sejak masuknya produsen LNG. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Provinsi Papua Barat
2015 - 2019**

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	16 573,31	18 549,04	20 483,63	22 513,25	24 598,07
2. Konsumsi LNPRT	584,36	654,26	713,6	779,95	882,99
3. Konsumsi Pemerintah	12 982,66	14 383,11	14 893,74	15 413,56	17 256,06
4. PMTB	13 116,11	13 991,27	14 997,31	16 237,11	18 236,33
5. Perubahan Inventori	1 320,22	2 846,68	3 764,35	842,98	1 068,84
6. Ekspor	41 630,33	33 142,78	43 107,60	55 681,46	50 324,14
7. Impor	23 318,96	16 936,06	26 174,29	31 825,39	28 018,73
Total PDRB	62 888,03	66 631,08	71 785,93	79 642,92	84 347,69

Ket :

r= Angka diperbaiki *= Angka Sementara **= Angka sangat sementara

Nilai PDRB Papua Barat (adh Berlaku) selama periode tahun 2015 s.d 2019 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya

perubahan harga dan juga perubahan volume. Komponen-komponen pada PDRB Pengeluaran pada umumnya mengalami peningkatan setiap tahun.

Komponen ekspor dan impor mengalami penurunan pada tahun 2016, dan nilai ekspor pada tahun 2016 menjadi nilai terendah dalam periode 5 tahun terakhir. Penurunan nilai ekspor yang terjadi pada tahun tersebut lebih besar daripada penurunan yang terjadi pada komponen impor. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada penurunan nilai net ekspor di tahun tersebut.

Pada tahun 2017 nilai ekspor dan impor kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2018 secara bersamaan. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas perdagangan antar wilayah (mencakup keluar daerah maupun keluar negeri) pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2019 nilai ekspor dan impor kembali mengalami penurunan.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Provinsi Papua Barat
2015 - 2019**

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	13 413,48	14.312,32	15 264,46	16 053,90	16 854,38
2. Konsumsi LNPRT	442,63	464,52	498,24	536,74	592,4
3. Konsumsi Pemerintah	9 174,90	9 286,84	9 315,31	9 393,48	9 715,19
4. PMTB	10 008,94	10 472,31	10 752,87	11 133,96	11 730,23
5. Perubahan Inventori	961,25	1 929,56	3 075,90	661,96	925,91
6. Ekspor	40 438,39	39 446,30	42 688,12	49 687,31	46 692,09
7. Impor	22 093,10	21 200,57	24 686,94	27 003,07	24 439,40
Total PDRB	52 346,49	54 711,28	56 907,96	60 464,28	62 070,80

Ket :

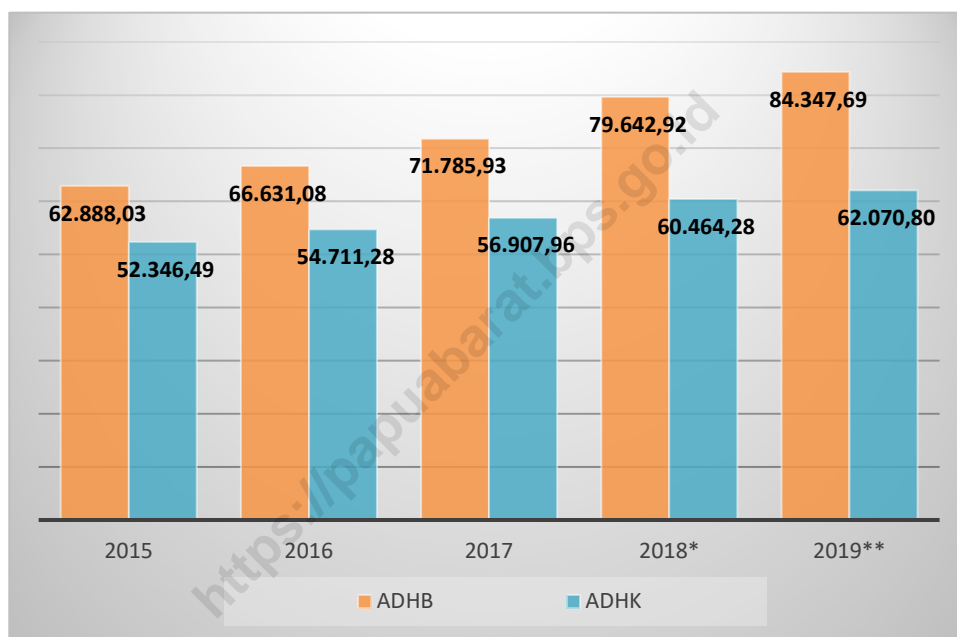
r= Angka diperbaiki * = Angka Sementara ** = Angka sangat sementara

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2015–2019, gambaran tentang perkembangan ekonomi Papua Barat berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2.

Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, komponen pengeluaran PDRB adh Konstan pada umumnya juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, beberapa

komponen mengalami penurunan. Sama seperti adh Berlaku, pada periode 5 tahun tersebut ekspor sempat mengalami penurunan namun hanya terjadi pada satu tahun yaitu tahun 2016 dan 2019. Selain pada ekspor, penurunan juga terjadi pada impor. Meskipun kedua komponen tersebut bersamaan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 penurunan yang terjadi pada komponen ekspor lebih besar dibandingkan penurunan pada komponen impor. Hal ini berdampak negatif terhadap nilai net ekspor adh konstan pada tahun 2016. Di sisi lain, pada tahun 2019 penurunan ekspor dan impor cukup sebanding.

Gambar 1. Perbandingan PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Papua Barat, Tahun 2015 – 2019 (Miliar Rupiah)



Ket :

r= Angka diperbaiki

*= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Dari Gambar 1, terlihat bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran, Provinsi Papua Barat
2015—2019**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	26,35	27,84	28,53	28,27	29,16
2. Konsumsi LNPRT	0,93	0,98	0,99	0,98	1,05
3. Konsumsi Pemerintah	20,64	21,59	20,75	19,35	20,46
4. PMTB	20,86	21,00	20,89	20,39	21,62
5. Perubahan Inventori	2,10	4,27	5,24	1,06	1,27
6. Ekspor	66,20	49,74	60,05	69,91	59,66
7. Impor	37,08	25,42	36,46	39,96	33,22
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket :

r= Angka diperbaiki

*= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa selama periode 2015 – 2019, komponen ekspor memiliki peran paling besar dalam PDRB Papua Barat. Peranan ekspor selalu berada di atas 50 persen kecuali pada tahun 2016. Hal tersebut diakibatkan penurunan nilai ekspor yang cukup besar pada tahun tersebut. Pembentukan PDRB komponen Ekspor Papua Barat didominasi oleh ekspor migas.

Dalam periode yang sama, komponen Impor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 25 hingga 39 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Peranan dari komponen ini cukup fluktuatif sepanjang tahun 2015 hingga 2019. Selanjutnya, proporsi konsumsi akhir rumah tangga juga cukup besar yaitu sekitar 26 – 29 persen. Sejak tahun 2015, peranan konsumsi akhir rumah tangga kian meningkat hingga tahun 2017. Namun peranan konsumsi akhir rumah tangga mengalami sedikit penurunan di tahun 2018 dan meningkat pesat di tahun 2019. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya perubahan struktur konsumsi masyarakat. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 19 hingga 22 persen. Pengeluaran untuk kapital (PMTB) mempunyai kontribusi yang hampir sama dengan konsumsi akhir pemerintah yaitu sekitar 20 hingga 21 persen. Baik konsumsi akhir pemerintah maupun PMTB memiliki distribusi yang stagnan selama tahun 2015 hingga 2019.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran, Provinsi Papua Barat
2015—2019**

					(Persen)
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,65	6,70	6,65	5,17	4,99
2. Konsumsi LNPRT	-1,51	4,95	7,26	7,73	10,37
3. Konsumsi Pemerintah	4,36	1,22	0,31	0,84	3,42
4. PMTB	10,95	4,63	2,68	3,54	5,36
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	14,44	-2,45	8,22	16,40	-6,03
7. Impor	50,67	-4,04	16,44	9,38	-9,49
Total PDRB	4,15	4,52	4,02	6,25	2,66

Ket :

r= Angka diperbaiki * = Angka Sementara ** = Angka sangat sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat dari tahun 2015-2019 cenderung mengalami sedikit fluktuasi, dengan masing-masing pertumbuhan 4,15 persen (2015); 4,52 persen (2016); 4,02 persen (2017); 6,25 persen (2018); dan 2,66 persen (2019). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 6,25 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2019 (2,66 persen).

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Papua Barat, 2015 – 2019¹**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	123,56	129,60	134,19	140,24	145,94
2. Konsumsi LNPRT	132,02	140,85	143,23	145,31	149,05
3. Konsumsi Pemerintah	141,50	154,88	159,88	164,09	177,62
4. PMTB	131,04	133,60	139,47	145,83	155,46
5. Perubahan Inventori	137,34	147,53	122,38	127,34	115,44
6. Ekspor	102,95	84,02	100,98	112,06	107,78
7. Impor	105,55	79,88	106,02	117,86	114,65
Total PDRB	120,14	121,79	126,14	131,72	135,89

Ket :

r= Angka diperbaiki * = Angka Sementara ** = Angka sangat sementara

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan)

¹ Indeks perkembangan

maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) dibandingkan dengan tahun dasar (tahun 2010). Indeks implisit dari hampir seluruh komponen pembentuk PDRB menurut Pengeluaran Papua Barat menunjukkan terdapat peningkatan harga dari tahun ke tahun (nilai indeks lebih dari 100), kecuali pada komponen Ekspor dan Impor. Baik komponen ekspor dan impor memiliki indeks implisit kurang dari 100 pada tahun 2016 yang dapat diartikan bahwa bila dibandingkan pada kondisi tahun 2010, terjadi penurunan harga pada komponen Ekspor dan Impor. Pada tahun 2017, indeks implisit ekspor dan impor sudah berada di atas 100.

Indeks implisit konsumsi akhir rumah tangga pada umumnya selalu meningkat setiap tahun mengikuti inflasi di Papua Barat. Sementara itu untuk komponen ekspor dan impor indeks implisit lebih fluktuatif karena dipengaruhi harga dolar dan harga komoditas, terutama migas.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi kedua terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran Papua Barat. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana lebih dari seperempat produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel berikut ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015 – 2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2015 s.d 2019 cukup stabil. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 29,16 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 26,35 persen.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat, 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	16 573,31	18 549,04	20 483,63	22 513,25	24 598,07
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	13 413,48	14 312,32	15 264,46	16 053,90	16 854,38
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	26,35	27,84	28,53	28,27	29,16
Rata-rata konsumsi per Rumah Tangga/ tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	86 116,59	94 016,77	101 322,83	108 730,78	116 045,58
b. ADHK 2010	69 697,79	72 542,73	75 506,10	77 534,48	79 513,42
Rata-rata konsumsi per kapita/ tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	19 016,77	20 763,18	22 377,65	24 015,21	25 633,21
b. ADHK 2010	15 391,08	16 020,74	16 675,89	17 124,93	17 563,65
Pertumbuhan²					
a. Total konsumsi RT	5,65	6,70	6,65	5,17	4,99
b. Per-RT	3,05	4,08	4,08	2,69	2,55
c. Perkapita	3,02	4,09	4,09	2,69	2,56
Jumlah RT (<i>unit</i>)	192 452	197 295	202 162	207 055	211 969
Jumlah penduduk (<i>orang</i>)	871 510	893 362	915 361	937 458	959 617

Ket :

r= Angka diperbaiki

*= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Selain itu perkembangan teknologi saat ini semakin memudahkan masyarakat untuk membeli barang secara online. Hal ini dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya dengan harga yang terkadang lebih murah daripada barang di pasar domestik, ataupun untuk mendapatkan barang yang tidak tersedia di pasar domestik.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2015, secara rata-rata setiap rumah tangga di Papua Barat menghabiskan dana sekitar 86.116,59 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan,

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (Atas Dasar Harga Konstan/ADHK 2010)

pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 94.016,77 ribu rupiah (2016), 101.322,83 ribu rupiah (2017); 108.730,78 ribu rupiah (2018); dan menjadi 116.045,58 ribu rupiah (2019).

Sementara itu, pada perkiraan adh Konstan 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga juga mengalami pertumbuhan. Pada 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 rata-rata konsumsi tumbuh sebesar 3,05 persen. Pada 2016 dan 2017 pertumbuhannya meningkat hingga 4,08 persen dan menurun terus menjadi 2,69 persen (2018) dan 2,55 persen (2019).

Di sisi lain, sepanjang tahun 2015 hingga 2019, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dan mendekati kenaikan rata-rata konsumsi rumah tangga. Rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Papua Barat meningkat dari tahun ke tahun, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 2,56 s.d 4.09 persen.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 5,65 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan ini meningkat pada 2016 menjadi 6,70 persen, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 6,65 persen pada tahun 2017 dan melambat kembali menjadi 5,17 persen (2018) dan 4,99 persen (2019).

Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat, Tahun 2015—2019

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	52,50	53,99	54,18	54,04	54,64
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,99	1,86	1,76	1,77	1,95
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	11,39	11,25	11,02	10,72	10,72
d. Kesehatan & Pendidikan	5,59	5,45	5,51	5,55	5,28
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	17,77	17,59	17,98	18,28	18,59
f. Hotel & Restoran	4,58	4,18	4,15	4,20	4,09
g. Lainnya	6,17	5,68	5,40	5,44	4,74
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket :

r= Angka diperbaiki

*= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Secara umum pada periode tahun 2015 – 2019, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Papua Barat, konsumsi makanan, minuman, dan rokok sedikit lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan berada pada kisaran 52 – 54 persen. Proporsi untuk makanan, minuman, dan rokok pada masing-masing tahun mencapai 52,50 persen (2015); 53,99 persen (2016); 54,18 persen (2017); 54,04 persen (2018); dan 54,64 persen (2019).

Bila ditilik lebih jauh mengenai konsumsi bukan makanan didominasi oleh konsumsi untuk kebutuhan Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya. Konsumsi untuk komponen tersebut berada pada kisaran 17 hingga 18 persen sepanjang tahun 2015 hingga 2019. Dalam periode yang sama, konsumsi bukan makanan juga didominasi untuk Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga yang berkisar antara 10 hingga 11 persen di tiap tahunnya.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat, 2015—2019

		(Persen)				
Kelompok Konsumsi	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,83	7,78	6,76	4,48	5,83	
b. Pakaian dan Alas Kaki	8,59	2,66	3,06	4,73	15,80	
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,15	6,54	3,52	4,44	6,32	
d. Kesehatan & Pendidikan	7,12	5,12	5,34	6,13	-0,66	
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,64	7,69	9,63	7,26	7,33	
f. Hotel & Restoran	4,83	-1,09	7,17	5,62	2,27	
g. Lainnya	7,10	4,03	4,71	4,64	-7,43	

Ket :

r= Angka diperbaiki

*= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, kelompok konsumsi pada pengeluaran rumah tangga di Papua Barat hampir selalu mengalami pertumbuhan positif dalam periode 2015 hingga 2019. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan daya beli masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Pertumbuhan negatif hanya dialami oleh Konsumsi Akhir Rumah Tangga untuk kelompok Hotel dan Restoran pada tahun 2016.

Pertumbuhan untuk kelompok makanan, minuman, dan rokok berkisar antara 3,83 persen (2015) hingga 7,78 persen (2016). Pertumbuhan melambat menjadi 6,76 persen pada tahun 2017 dan menjadi 4,48 persen pada tahun 2018. Pertumbuhan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 5,83 persen.

Pada kelompok konsumsi bukan makanan, pola pertumbuhan juga cukup fluktuatif, dimana tahun 2015 terjadi pertumbuhan lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana dari 6 kelompok konsumsi, 4 diantaranya mengalami pertumbuhan di atas 7 persen.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Papua Barat, 2015—2019³

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,14	6,53	3,52	5,08	4,41
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,41	9,45	6,32	3,74	4,05
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,74	2,06	1,10	5,59	4,20
d. Kesehatan & Pendidikan	6,94	2,41	5,60	2,58	2,16
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,74	6,08	2,32	1,97	3,03
f. Hotel & Restoran	7,69	5,78	6,86	4,62	5,32
g. Lainnya	6,33	3,44	2,97	3,96	4,73

Ket :

r= Angka diperbaiki * = Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

³ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga (inflasi) cukup fluktuatif pada masing-masing kelompok konsumsi. Peningkatan harga dihitung menggunakan tahun dasar 2010. Secara sederhana, hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan harga tersebut dihasilkan dengan membandingkan tingkat harga suatu kelompok konsumsi pada tahun tertentu terhadap tingkat harga kelompok konsumsi yang sama pada tahun 2010. Nilai pertumbuhan implisit yang positif memperlihatkan terdapat kenaikan harga dibandingkan kondisi pada tahun dasar. Sebaliknya, pertumbuhan implisit yang negatif menunjukkan terdapat penurunan harga dibandingkan kondisi pada tahun dasar.

Sepanjang tahun 2015-2019, kelompok konsumsi Makanan, Minuman, dan Rokok memiliki pertumbuhan implisit yang positif. Adapun rincian peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan rokok terjadi sebesar 8,14 kemudian melambat menjadi 6,53 persen di tahun 2016 dan 3,52 di tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 5,08 persen hingga mengalami perlambatan kembali menjadi 4,41 persen pada tahun 2019.

Sementara itu, pada kelompok konsumsi bukan makanan, pertumbuhan implisit cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Beberapa kelompok konsumsi juga sempat mengalami penurunan harga dibandingkan tingkat harga pada tahun 2010. Yang cukup berfluktuasi adalah kelompok Konsumsi pakaian dan alas kaki yang mengalami inflasi dengan rentang tinggi, yakni berada pada rentang 3,74 hingga 9,45 persen dalam 5 tahun terakhir.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Provinsi Papua Barat, 2015—2019**

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	584,36	654,26	713,60	779,95	882,99
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	442,63	464,52	498,24	536,74	592,40
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,93	0,98	0,99	0,98	1,05
Pertumbuhan (ADHK)	-1,51	4,95	7,26	7,73	10,37

Ket :

r= Angka diperbaiki

*= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Selama periode 2015 – 2019, nilai konsumsi LNPRT baik adh Berlaku maupun adh Konstan selalu mengalami peningkatan. Tidak hanya itu, proporsi terhadap PDRB juga cenderung meningkat meskipun sempat menurun sedikit kembali pada tahun 2018. Meskipun demikian, nilainya yang sangat kecil menyebabkan perubahan proporsi konsumsi LNPRT kurang memberikan dampak terhadap PDRB. Proporsi terbesar hanya sebesar 1,05 persen yang terjadi pada tahun 2019. Sepanjang tahun 2015 hingga 2018 proporsi konsumsi LNPRT terhadap total PDRB Provinsi Papua Barat selalu di bawah 1 persen. Mulai dari tahun 2019 menjadi di atas 1 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian provinsi Papua Barat serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2015, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 12.982,66 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai 17.256,06 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi kuantitas.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Provinsi Papua Barat, 2015 – 2019**

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	12 982,66	14 383,11	14 893,74	15 413,56	17 256,06
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	9 174,90	9 286,84	9 315,31	9 393,48	9 715,19
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	20,64	21,59	20,75	19,35	20,46
Konsumsi Pemerintah per kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	14 896,75	16 099,98	16 270,89	16 441,87	17 982,24
b. ADHK 2010	10 527,59	10 395,39	10 176,65	10 020,16	10 124,03
Konsumsi Pemerintah per-pegawai pemerintah (Ribu Rp)					
a. ADHB	342 442,04	333 320,48	342 211,68	350 523,31	393 327,46
b. ADHK 2010	242 005,12	215 217,32	214 036,80	213 619,24	221 444,07
Pertumbuhan ⁴					
a. Total konsumsi Pemerintah	4,36	1,22	0,31	0,84	3,42
b. Konsumsi perkapita	1,76	-1,26	-2,10	-1,54	1,04
c. Konsumsi per-pegawai	4,36	-11,07	-0,55	-0,20	3,66
Jumlah Pegawai Pemerintah ⁵	37 912	43 151	43 522	43 973	43 872
Jumlah penduduk	871 510	893 362	915 361	937 458	959 617

Ket :

r= Angka diperbaiki * = Angka Sementara ** = Angka sangat sementara

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2015 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 14.896,75 milyar rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11). Selain itu juga dapat dilihat nilai konsumsi pemerintah per-pegawai dan pertumbuhannya.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata per penduduk. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Mulai tahun 2016 hingga 2018, konsumsi pemerintah secara total mengalami

⁴ Diturunkan dari perhitungan PDRB (Atas Dasar Harga Konstan/ADHK)

⁵ Tidak termasuk polisi dan militer

pelambatan sedangkan untuk konsumsi pemerintah per kapita selalu mengalami penurunan. Tetapi di tahun 2019 konsumsi pemerintah total maupun per kapita mengalami peningkatan.

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Sekitar 78 hingga 80 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (lihat tabel 12). Namun tidak begitu untuk proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah hanya meningkat hingga tahun 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga 2019. Proporsi pembiayaan pengeluaran pemerintah kolektif tertinggi terjadi pada tahun 2016, yakni sebesar 79,90 persen dari total pengeluaran pemerintah Papua Barat.

**Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Provinsi Papua Barat, 2015 – 2019**

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja) Pemerintah					
a. Konsumsi Kolektif (<i>Miliar Rp</i>)	10 292,56	11 492,33	11 821,73	12 162,62	13 677,36
(%)	79,28	79,90	79,37	78,91	79,26
b. Konsumsi Individu (<i>Miliar Rp</i>)	2 690,10	2 890,78	3 072,01	3 250,94	3 578,70
(%)	20,72	20,10	20,63	21,09	20,74
Total Konsumsi (<i>Miliar Rp</i>)	12 982,66	14 383,11	14 893,74	15 413,56	17 256,06
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan riil (ADHK 2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	4,38	1,48	-0,30	0,38	3,16
b. Konsumsi Individu	4,31	0,21	2,65	2,55	4,41
Total Konsumsi	4,36	1,22	0,31	0,84	3,42
Pertumbuhan indeks harga (%) implisit ⁶					
a. Konsumsi Kolektif	7,32	10,02	3,17	2,49	9,01
b. Konsumsi Individu	7,16	7,24	3,53	3,19	5,43
Total Konsumsi	7,29	9,45	3,23	2,63	8,25

Ket :

r= Angka diperbaiki *= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Konsumsi individu secara nominal pada umumnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan peningkatan proporsi konsumsi kolektif, berdampak pada penurunan proporsi konsumsi individu pada periode 2015-2019 terhadap total pengeluaran pemerintah.

⁶ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁷. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB
Provinsi Papua Barat, 2015 - 2019**

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	13 116,11	13 991,27	14 997,31	16 237,11	18 236,33
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	10 008,94	10 472,31	10 752,87	11 133,96	11 730,23
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	20,86	21,00	20,89	20,39	21,62
Struktur PMTB ⁸					
a. Bangunan (Miliar Rp)	9 728,27	10 659,74	11 248,43	12 016,08	12 898,80
(%)	74,17	76,19	75,00	74,00	70,73
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	3 387,84	3 331,52	3 748,87	4 221,03	5 337,53
(%)	25,83	23,81	25,00	26,00	29,27
Total PMTB (Miliar Rp)	13 116,11	13 991,27	14 997,31	16 237,11	18 236,33
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ⁹ (%)	10,95	4,63	2,68	3,54	5,36
a. Bangunan	11,89	7,69	2,39	2,72	1,04
b. Non Bangunan	8,29	-4,30	3,61	6,21	18,90

Ket :

r= Angka diperbaiki *= Angka Sementara **= Angka sangat sementara

Nilai PMTB menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun secara nominal. Nilai PMTB nominal yang semula sebesar 13.116,11 Miliar Rupiah sudah meningkat menjadi 18.236,33 Miliar Rupiah pada tahun 2019. Senada dengan hal tersebut, peningkatan juga terjadi pada nilai PMTB riil. Nilai PMTB secara riil yang semula sebesar 10.008,94 Miliar Rupiah sudah meningkat menjadi 11.730,23 Miliar Rupiah pada tahun 2019.

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal

⁷ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB(Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB)

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB(Atas Dasar Harga Konstan/ADHK 2010)

tetap yaitu lebih dari 70 persen. Pertumbuhan dari PMTB Bangunan terbilang sangat fluktuatif pada periode 2015 hingga 2019.

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif stabil selama periode 2014–2018 hanya berkisar pada 23 – 29 persen (tabel 13). Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 29,27 persen. Pertumbuhan “riil” PMTB bangunan maupun non bangunan juga cukup berfluktuasi. Secara total pada tahun 2015 tumbuh sebesar 10,95 namun pada tahun tahun berikutnya hanya berkisar antara 2-5 persen saja. Pada tahun 2016 bahkan terjadi penurunan 4,30 persen pada PMTB Non Bangunan.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Provinsi Papua Barat, 2015—2019**

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 320,22	2 846,68	3 764,35	842,98	1 068,84
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	961,25	1 929,56	3 075,90	661,96	925,91
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,10	4,27	5,24	1,06	1,27

Ket :

r= Angka diperbaiki

*= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2015 perubahan inventori sebesar 1.320,22 miliar rupiah, dan meningkat menjadi 2.846,68 miliar rupiah pada tahun 2016 dengan proporsi terhadap PDRB sebesar 4,27 persen. Pada tahun 2017, perubahan inventori tercatat meningkat kembali dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi sebesar 3.764,35 miliar rupiah. Pada tahun 2018, perubahan inventori mengalami perlambatan yaitu sebesar 842,98 miliar rupiah dan mempunyai proporsi 1,06 persen terhadap PDRB secara keseluruhan. Pada Tahun 2019 perubahan inventori meningkat di angka 1.068,84 miliar rupiah.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Menurut komposisinya, ekspor luar negeri Papua Barat didominasi oleh Ekspor berupa barang (rata-rata 99 persen), sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Komoditi ekspor luar negeri Papua Barat didominasi lebih dari 97 persen oleh Minyak dan Gas yang dihasilkan BP. Berau- LNG Tangguh di Bintuni. Pertumbuhan riil total ekspor luar negeri berfluktuasi dari tahun ke tahun dalam periode 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 16,34 persen. Total Ekspor luar negeri kemudian mengalami kontraksi kembali pada tahun 2016 hingga minus 15,27 persen.

**Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri
Provinsi Papua Barat, 2015 – 2019**

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	36 428,40	23 355,46	26 580,80	40 254,33	33 000,02
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	35 728,09	30 274,09	28 211,98	37 298,77	33 940,41
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	57,93	35,05	37,03	50,54	39,12
Struktur Ekspor ¹⁰					
a. Barang (Miliar Rp)	36 338,09	23 266,06	26 488,16	40 164,26	32 923,61
(%)	99,75	99,62	99,65	99,78	99,77
b. Jasa (Miliar Rp)	90,31	89,40	92,64	90,07	76,40
(%)	0,25	0,38	0,35	0,22	0,23
Total Ekspor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹¹ (%)					
- Barang	16,34	-15,29	-6,83	32,30	-8,99
- Jasa	13,70	-1,43	3,30	-9,23	-16,46
Total Ekspor	16,34	-15,27	-6,81	32,21	-9,00

Ket :

r= Angka diperbaiki *= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Pertumbuhan negatif tersebut dihasilkan dari pertumbuhan Ekspor Luar Negeri Barang maupun Jasa yang keduanya mengalami kontraksi pada tahun 2016. Kontraksi masih terus berlanjut di tahun 2017 meskipun kontraksi yang terjadi tidak sedalam kontraksi pada tahun 2016. Pada tahun 2017, komponen Ekspor luar negeri mengalami kontraksi sebesar minus 6,81 persen. Namun pada tahun 2018, komponen Ekspor luar negeri mengalami pertumbuhan yang sangat besar yaitu sebesar 32,21 persen. Setelah itu pada tahun 2019 mengalami kontraksi lagi sebesar minus 9 persen.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Papua Barat di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri
Provinsi Papua Barat, 2015 - 2019**

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	732,83	1 546,42	907,99	1 363,20	1 665,15
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	178,58	869,30	377,18	828,32	1 077,88
Proporsi terhadap PDRB (% -ADHB)	1,17	2,32	1,26	1,71	1,97
Struktur ¹² Impor					
a. Barang (<i>Miliar Rp</i>)	178,58	869,30	377,18	828,32	1 077,88
(%)	24,37	56,21	41,54	60,76	64,73
b. Jasa (<i>Miliar Rp</i>)	554,25	677,12	530,81	534,88	587,27
(%)	75,63	43,79	58,46	39,24	35,27
Total Impor	(%) 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ¹³ (%)					
- Barang	-50,47	381,51	-57,16	114,67	31,83
- Jasa	15,71	26,29	-21,71	-3,87	-2,49
Total Impor	-15,37	123,95	-42,66	48,48	19,43

Ket :

r= Angka diperbaiki

*= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Tabel 16 di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor luar negeri adh berlaku Papua Barat dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan yang cukup besar, yakni dari 732,83 miliar rupiah pada tahun 2015, menjadi 1.665,15 miliar rupiah pada tahun 2019. Perkembangan signifikan juga terjadi pada impor luar negeri adh konstan 2010, yakni impor luar

¹² Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHB)

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

negeri bernilai sebesar 499,43 miliar rupiah pada tahun 2015, meningkat cukup tajam menjadi 1137,22 miliar rupiah pada tahun 2019.

Peningkatan nilai impor luar negeri dalam periode 5 tahun terakhir secara tidak langsung mempengaruhi proporsi impor luar negeri terhadap total PDRB yang juga ikut meningkat. Pada tahun 2015, proporsi impor luar negeri sebesar 1,17 persen terhadap total PDRB Papua Barat. Proporsi ini meningkat hingga mencapai 1,97 persen pada tahun 2019. Proporsi impor luar negeri setiap tahunnya dapat dikatakan sangat kecil. Hal ini disebabkan barang impor di Papua Barat lebih banyak didatangkan dari luar daerah di dalam negeri.

Di sisi lain, secara riil nilai impor luar negeri mengalami pertumbuhan yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2015 pertumbuhan riil impor mengalami kontraksi sebesar minus 15,37 persen. Kondisi kemudian berbalik pada tahun 2016, di mana impor luar negeri mengalami pertumbuhan hingga mencapai 123,95 persen, tetapi mengalami kontraksi kembali hingga minus 42,66 persen di tahun 2017. Dan mengalami kenaikan sebesar 48,48 persen pada tahun 2018 dan 19,43 persen pada tahun 2019.

Kenaikan maupun penurunan secara fluktuatif ini diakibatkan oleh impor barang mesin dan transportasi yang didatangkan dari Luar Negeri. Nilai untuk komoditi tersebut menyebabkan kenaikan yang signifikan jika di tahun terkait, tetapi sebaliknya Impor Luar Negeri Papua Barat mengalami kontraksi yang tajam saat tidak ada komoditi tersebut.

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Nilai Ekspor Antar Daerah di Papua Barat berfluktuatif, hal ini dipengaruhi besar oleh Ekspor Minyak di wilayah Sorong yang memenuhi permintaan dalam negeri. Selain itu ekspor komoditas unggulan seperti semen, perikanan dan perkebunan memiliki peminat yang cukup banyak di dalam negeri. Struktur Net Ekspor Antar Daerah menunjukkan nilai negatif yang berarti nilai impor antar daerah jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor yang dilakukan oleh Papua Barat ke luar daerah. Perkembangan net antar daerah Papua Barat terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 17. Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Antar Daerah
Provinsi Papua Barat, 2015—2019**

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor Antar Daerah					
a. ADHB (Miliar Rp)	-17 384,21	-5 602,32	-8 739,49	-15 035,06	-9 029,46
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	-16 883,38	-10 909,88	9 569,50	-13 662,29	-10 550,50
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	-27,64	-8,41	-12,17	-18,88	-10,71

Ket :

r= Angka diperbaiki

*= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENGURUT PENGELUARAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015-2019



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

**Tabel 18. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Provinsi Papua Barat, 2015—2019**

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
a. ADHB	62 888,03	66 631,08	71 785,93	79 642,92	84 347,69
b. ADHK 2010	52 346,49	54 711,28	56 907,96	60 464,28	62 070,80
PDRB Perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	72 159,85	74 584,63	78 423,63	84 956,26	87 897,25
b. ADHK 2010	60 064,13	61 242,01	62 169,96	64 498,12	64 682,89
Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK 2010	1,56	1,96	1,52	3,74	0,29
Jumlah penduduk	871 510	893 362	915 361	937 458	959 617
Pertumbuhan (%)	2,55	2,51	2,46	2,41	2,36

Ket :

r= Angka diperbaiki *= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

PDRB per-kapita Provinsi Papua Barat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 18), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi

setiap penduduk Papua Barat rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” selalu bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata PDRB (nilai tambah) yang diciptakan setiap penduduk Papua Barat selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dalam periode 2015-2019. Pertumbuhan PDRB per kapita pada periode 2015 – 2019 berada pada kisaran minus 0,29 – 3,74 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat pada kisaran 2,36 – 2,55 persen.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi sekitar 26-29 persen terhadap PDRB Papua Barat, yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Papua Barat sebanyak 26-29 persen digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Meskipun di dalam konsumsi akhir rumah tangga tersebut termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 19. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	16 573,31	18 549,04	20 483,63	22 513,25	24 598,07
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	41 630,33	33 142,78	43 107,60	55 681,46	50 324,14
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	0,40	0,56	0,48	0,40	0,49

Ket :

r= Angka diperbaiki

*= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar 0,40 kali dari yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan ekspor. Rasio ini mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,56. Kemudian turun menjadi 0,48 pada tahun 2017 dan 0,40 pada tahun 2018. Setelah itu kembali mengalami kenaikan menjadi 0,49 pada tahun 2019. Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin meningkat

dan atau sebaliknya nilai ekspor semakin menurun. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 20. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
 Tahun 2015—2019**

Uraian (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 ^r (4)	2018* (5)	2019** (6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	16 573,31	18 549,04	20 483,63	22 513,25	24 598,07
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	13 116,11	13 991,27	14 997,31	16 237,11	18 236,33
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	1,26	1,33	1,37	1,39	1,35

Ket :

r= Angka diperbaiki

*= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Rasio antara konsumsi rumah tangga terhadap PMTB pada periode 2015-2019 berkisar pada angka 1,26 hingga 1,39. Nilai yang lebih dari satu menunjukkan bahwa penggunaan PDRB untuk konsumsi rumah tangga selalu lebih besar dibandingkan penggunaan untuk PMTB.

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB mengalami fluktuasi dalam periode 2015 hingga 2019, dari sebesar 1,26 di tahun 2015 meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 1,33. Rasio ini meningkat lagi mencapai 1,37 pada tahun 2017 dan mencapai 1,39 pada tahun 2018. Setelah itu, rasio tersebut turun menjadi 1,35 persen pada tahun 2019. Meskipun berfluktuasi, rasio ini selalu berkisar di atas nilai 1. Hal ini diindikasikan karena kenaikan nilai konsumsi akhir rumah tangga tidak secepat kenaikan nilai investasi.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi

tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 21. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Papua Barat, 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	16 573,31	18 549,04	20 483,63	22 513,25	24 598,07
b. LNPRT	584,36	654,26	713,60	779,95	882,99
c. Pemerintah	12 982,66	14 383,11	14 893,74	15 413,56	17 256,06
Jumlah	30 140,33	33 586,41	36 090,96	38 706,77	42 737,11
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	62 888,03	66 631,08	71 785,93	79 642,92	84 347,69
Proporsi	47,93	50,41	50,28	48,60	50,67

Ket :

r= Angka diperbaiki *= Angka Sementara **= Angka sangat sementara

Barang dan jasa yang berada di wilayah domestik yang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir selalu meningkat nilainya setiap tahun. Dengan peningkatan nilai tersebut, proporsinya terhadap PDRB juga semakin mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peranan yang berkurang setiap tahunnya. Tahun 2016 dan 2017 bahkan penggunaan untuk konsumsi akhir telah sedikit melebihi separuh total PDRB adh berlaku Papua Barat namun pada tahun 2018 menurun lagi menjadi di bawah separuh yaitu sebesar 49,25 persen. Pada tahun 2019 proporsi tersebut meningkat ke angka 50,67 persen.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar daerah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Selama tahun 2015 – 2019 ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB, bahkan sempat mencapai lebih dari 3 kali lipat pada tahun 2015. Rasio ini kemudian menurun di tahun 2016, hingga mencapai 2,37 kemudian meningkat lagi di tahun 2017 menjadi 2,87 dan 3,43 di tahun 2018. Pada tahun 2019, menurun kembali menjadi 2,76. Hal ini terjadi seiring mengikuti pola naik

turunnya nilai ekspor yang pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan, meningkat kembali pada tahun 2017 hingga tahun 2018, kemudian meningkat di tahun 2019.

Tabel 22. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	41 630,33	33 142,78	43 107,60	55 681,46	50 324,14
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	13 116,11	13 991,27	14 997,31	16 237,11	18 236,33
Rasio Ekspor terhadap PMTB	3,17	2,37	2,87	3,43	2,76

Ket :

r= Angka diperbaiki

*= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor baik dari luar negeri maupun luar provinsi di dalam negeri. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 23. Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Papua Barat Tahun 2015—2019

Uraian	2015	2016	2017^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	62 888,03	66 631,08	71 785,93	79 642,92	84 347,69
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	23 318,96	16 936,06	26 174,29	31 825,39	28 018,73
Rasio PDRB terhadap Impor	2,70	3,93	2,74	2,50	3,01

Ket :

r= Angka diperbaiki

*= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2015 tercatat sebesar 2,70. Rasio kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 3,93. Pada tahun 2017 rasio PDRB terhadap impor turun kembali menjadi 2,74 dan turun lagi menjadi 2,50 pada tahun 2018. Setelah itu pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 3,01. Rasio tertinggi dalam periode 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2016 (3,93), lebih disebabkan peningkatan PDRB, sedangkan nilai impor justru menurun. Peningkatan rasio

menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDRB terhadap produk impor yang bersifat positif terhadap perekonomian.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 24. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Provinsi Papua Barat, 2015—2019**

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	62 888,03	66 631,08	71 785,93	79 642,92	84 347,69
(%)	72,95	79,73	73,28	71,45	75,06
Total nilai Impor ADHB (Miliar Rp)	23 318,96	16 936,06	26 174,29	31 825,39	28 018,73
(%)	27,05	20,27	26,72	28,55	24,94
Total Permintaan Akhir ¹⁴ (Miliar Rp)	86 206,99	83 567,14	97 960,22	111 468,32	112 366,42
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket :

r= Angka diperbaiki

*= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar daerah, dengan rentang 20 s.d 28 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 70 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat cukup meningkat tinggi dari 86.206,99 miliar rupiah (2015) menjadi 112.366,42 miliar rupiah (2019). Di sisi lain, “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik juga meningkat dari 23.318,96 miliar rupiah (2015) menjadi 28.018,73 miliar rupiah (2019).

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan

¹⁴ Termasuk diskrepansi statistik

nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 25. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
 Provinsi Papua Barat, 2015—2019**

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	41 630,33	33 142,78	43 107,60	55 681,46	50 324,14
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	23 318,96	16 936,06	26 174,29	31 825,39	28 018,73
Net ekspor (X – M) (Miliar Rp)	18 311,36	16 206,72	16 933,31	23 856,07	22 305,41
Rasio ekspor thdp Impor	1,79	1,96	1,65	1,75	1,80

Ket :

r= Angka diperbaiki

*= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Selama periode 2015 - 2019, posisi perdagangan barang dan jasa provinsi Papua Barat dengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi Papua Barat selalu dalam posisi surplus. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “**tabungan luar negeri**”. Surplus perdagangan Provinsi Papua Barat yang terjadi antara tahun 2015 sampai dengan 2019 tercatat masing-masing sebesar 18.311,36 miliar rupiah (2015), 16.206,71 miliar rupiah (2016), 16.993,31 miliar rupiah (2017), 23.856,07 miliar rupiah (2018), dan 22.305,41 miliar rupiah (2019).

Nilai ekspor yang selalu lebih besar daripada nilai impor, berimplikasi kepada rasio ekspor terhadap impor bernilai lebih dari nilai 1. Nilai rasio ini berkisar antara nilai 1,65 hingga 1,96 dalam

periode 2015-2019. Rasio ekspor terhadap impor yang terbesar terjadi pada tahun 2016, yakni mencapai 1,96.

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d + 1 ($-1 < RPI < +1$). Jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

**Tabel 26. Rasio Perdagangan Internasional,
Provinsi Papua Barat, 2015 - 2019**

Uraian	2015	2016	2017 ^r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (Miliar Rp)	36 428,40	23 355,46	26 580,80	40 254,33	33 000,02
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar Rp)	732,83	1 546,42	907,99	1 363,20	1 665,15
(X - M) (Miliar Rp)	35 695,57	21 809,04	25 672,81	38 891,13	31 334,87
(X + M) (Miliar Rp)	37 161,23	24 901,88	27 488,79	41 617,53	34 665,17
R P I	0,96	0,88	0,93	0,93	0,90

Ket :

r= Angka diperbaiki

*= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015-2019, posisi ekspor selalu lebih tinggi dari impor karena bernilai positif dan mendekati 1. Dengan nilai Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Papua Barat pada periode 2015-2019 yang bernilai positif dan mendekati nilai 1, hal ini mengindikasikan bahwa perdagangan internasional Papua Barat selalu didominasi oleh kegiatan ekspor, dengan rasio yang sangat tinggi yaitu berkisar antara 0,88 sampai dengan 0,96. Dengan kata lain, menunjukkan ekspor luar negeri sangat dominan, sementara impor luar negeri dalam bentuk barang dan jasa hanya sebagian kecil.

4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 27. Incremental Capital Output Ratio,
 Provinsi Papua Barat, 2015 – 2019**

Uraian	2015	2016	2017 ^f	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	52 346,49	54 711,28	56 907,96	60 464,28	62 070,80
Perubahan (miliar rupiah)	2 086,58	2 364,80	2 196,68	3 556,32	1 606,53
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	10 008,94	10 472,31	10 752,87	11 133,96	11 730,23
ICOR	4,80	4,43	4,90	3,13	7,30

Ket :

r = Angka diperbaiki

* = Angka Sementara

** = Angka sangat sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR mengalami sedikit fluktuasi dalam periode 5 tahun terakhir. Nilai ICOR sebesar 4,80 pada tahun 2015 turun menjadi 4,43 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, ICOR Provinsi Papua Barat meningkat kembali dan mencapai sebesar 4,90 dan turun menjadi

3,3 di tahun 2018. Setelah itu nilai ICOR meningkat kembali menjadi 7,30 di tahun 2019 yang menjadi nilai ICOR terbesar selama periode 2015-2019.

Penggunaan koefisien ICOR yang besar untuk perencanaan harus berhati-hati. Akan lebih baik jika ICOR yang digunakan adalah ICOR rata-rata dari beberapa tahun series data. Ini lebih mencerminkan kondisi ICOR yang sesungguhnya.

<https://papuabarat.bps.go.id>

<https://papuabarat.bps.go.id>

BAB V

PENUTUP



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2015 s.d 2019 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Papua Barat pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2015 s.d 2019, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Papua Barat terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

LAMPIRAN



Lampiran 1. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Papua Barat 2015-2019 (Milyar Rupiah)					
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	16 573,31	18 549,04	20 483,63	22 513,25	24 598,07
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	7 700,58	8 924,76	9 886,05	10 862,56	11 993,34
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	1 001,04	1 089,47	1 211,13	1 303,36	1 446,34
1.c. Pakaian	329,66	345,41	359,91	398,01	480,26
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	1 222,52	1 360,05	1 487,21	1 599,62	1 819,17
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	665,37	727,49	770,29	814,76	818,19
1.f. Kesehatan	671,12	751,48	844,30	940,14	951,76
1.g. Transportasi/Angkutan	2 171,53	2 433,28	2 763,42	3 094,95	3 337,70
1.h. Komunikasi	424,55	455,41	513,89	580,56	726,33
1.i. Rekreasi dan Budaya	349,29	374,96	405,11	439,88	508,31
1.j. Pendidikan	256,14	258,84	284,54	309,06	346,31
1.k. Penginapan dan Hotel	758,86	775,09	851,04	945,32	1 005,31
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1 022,64	1 052,81	1 106,73	1 225,02	1 165,06
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	584,36	654,26	713,60	779,95	882,99
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	12 982,66	14 383,11	14 893,74	15 413,56	17 256,06
3.a. Konsumsi Kolektif	10 292,56	11 492,33	11 821,73	12 162,62	13 677,36
3.b. Konsumsi Individu	2 690,10	2 890,78	3 072,01	3 250,94	3 578,70
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	13 116,11	13 991,27	14 997,31	16 237,11	18 236,33
4.a. Bangunan	9 728,27	10 659,74	11 248,43	12 016,08	12 898,80
4.b. Non-Bangunan	3 387,84	3 331,52	3 748,87	4 221,03	5 337,53
5. Perubahan Inventori	1 320,22	2 846,68	3 764,35	842,98	1 068,84
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	36 428,40	23 355,46	26 580,80	40 254,33	33 000,02
6.a. Barang	36 338,09	23 266,06	26 488,16	40 164,26	32 923,61
6.b. Jasa	90,31	89,40	92,64	90,07	76,40
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	732,83	1 546,42	907,99	1 363,20	1 665,15
7.a. Barang	178,58	869,30	377,18	828,32	1 077,88
7.b. Jasa	554,25	677,12	530,81	534,88	587,27
8. Net Ekspor Antar Daerah	-17 384,21	-5 602,32	-8 739,49	-15 035,06	-9 029,46
PDRB (1+2+3+4+5+6-7+8)	62 888,03	66 631,08	71 785,93	79 642,92	84 347,69

Ket :

r= Angka diperbaiki *= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Papua Barat 2015-2019 (Milyar Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	13 413,48	14 312,32	15 264,46	16 053,90	16 854,38
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	6 049,55	6 581,55	7 042,47	7 363,73	7 786,70
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	736,27	732,15	765,50	794,08	846,86
1.c. Pakaian	307,39	315,57	325,22	340,60	394,44
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	934,32	1 014,98	1 050,97	1 101,95	1 226,69
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	563,47	580,76	600,97	623,38	607,60
1.f. Kesehatan	560,06	592,85	623,30	663,39	637,65
1.g. Transportasi/Angkutan	1 746,89	1 892,38	2 087,22	2 248,68	2 315,60
1.h. Komunikasi	426,93	452,25	487,32	522,57	646,87
1.i. Rekreasi dan Budaya	338,03	360,43	390,97	409,55	451,60
1.j. Pendidikan	217,21	224,25	237,41	250,06	269,78
1.k. Penginapan dan Hotel	586,15	579,78	621,34	656,26	671,19
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	947,21	985,38	1 031,77	1 079,64	999,41
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	442,63	464,52	498,24	536,74	592,40
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	9 174,90	9 286,84	9 315,31	9 393,48	9 715,19
3.a. Konsumsi Kolektif	7 278,05	7 386,03	7 364,17	7 392,49	7 625,86
3.b. Konsumsi Individu	1 896,85	1 900,82	1 951,14	2 000,99	2 089,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	10 008,94	10 472,31	10 752,87	11 133,96	11 730,23
4.a. Bangunan	7 456,46	8 029,50	8 221,77	8 445,57	8 533,81
4.b. Non-Bangunan	2 552,49	2 442,81	2 531,10	2 688,39	3 196,42
5. Perubahan Inventori	961,25	1 929,56	3 075,90	661,96	925,91
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	35 728,09	30 274,09	28 211,98	37 298,77	33 940,41
6.a. Barang	35 670,16	30 217,00	28 153,00	37 245,22	33 895,68
6.b. Jasa	57,93	57,10	58,99	53,54	44,73
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	499,43	1 118,48	641,31	952,23	1 137,22
7.a. Barang	137,31	661,16	283,26	608,05	801,61
7.b. Jasa	362,12	457,32	358,05	344,18	335,60
8. Net Ekspor Antar Daerah	-16 883,38	-10 909,88	-9 569,50	-13 662,29	-10 550,50
PDRB (1+2+3+4+5+6-7+8)	52 346,49	54 711,28	56 907,96	60 464,28	62 070,80

Ket :

r= Angka diperbaiki *= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

**Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Papua Barat 2015-2019 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	26,35	27,84	28,53	28,27	29,16
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	12,24	13,39	13,77	13,64	14,22
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	1,59	1,64	1,69	1,64	1,71
1.c. Pakaian	0,52	0,52	0,50	0,50	0,57
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	1,94	2,04	2,07	2,01	2,16
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	1,06	1,09	1,07	1,02	0,97
1.f. Kesehatan	1,07	1,13	1,18	1,18	1,13
1.g. Transportasi/Angkutan	3,45	3,65	3,85	3,89	3,96
1.h. Komunikasi	0,68	0,68	0,72	0,73	0,86
1.i. Rekreasi dan Budaya	0,56	0,56	0,56	0,55	0,60
1.j. Pendidikan	0,41	0,39	0,40	0,39	0,41
1.k. Penginapan dan Hotel	1,21	1,16	1,19	1,19	1,19
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1,63	1,58	1,54	1,54	1,38
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,93	0,98	0,99	0,98	1,05
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	20,64	21,59	20,75	19,35	20,46
3.a. Konsumsi Kolektif	16,37	17,25	16,47	15,27	16,22
3.b. Konsumsi Individu	4,28	4,34	4,28	4,08	4,24
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	20,86	21,00	20,89	20,39	21,62
4.a. Bangunan	15,47	16,00	15,67	15,09	15,29
4.b. Non-Bangunan	5,39	5,00	5,22	5,30	6,33
5. Perubahan Inventori	2,10	4,27	5,24	1,06	1,27
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	57,93	35,05	37,03	50,54	39,12
6.a. Barang	57,78	34,92	36,90	50,43	39,03
6.b. Jasa	0,14	0,13	0,13	0,11	0,09
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	1,17	2,32	1,26	1,71	1,97
7.a. Barang	0,28	1,30	0,53	1,04	1,28
7.b. Jasa	0,88	1,02	0,74	0,67	0,70
8. Net Ekspor Antar Daerah	-27,64	-8,41	-12,17	-18,88	-10,71
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket :

r= Angka diperbaiki *= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Papua Barat 2015-2019 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	25,62	26,16	26,82	26,55	27,15
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	11,56	12,03	12,38	12,18	12,54
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	1,41	1,34	1,35	1,31	1,36
1.c. Pakaian	0,59	0,58	0,57	0,56	0,64
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	1,78	1,86	1,85	1,82	1,98
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	1,08	1,06	1,06	1,03	0,98
1.f. Kesehatan	1,07	1,08	1,10	1,10	1,03
1.g. Transportasi/Angkutan	3,34	3,46	3,67	3,72	3,73
1.h. Komunikasi	0,82	0,83	0,86	0,86	1,04
1.i. Rekreasi dan Budaya	0,65	0,66	0,69	0,68	0,73
1.j. Pendidikan	0,41	0,41	0,42	0,41	0,43
1.k. Penginapan dan Hotel	1,12	1,06	1,09	1,09	1,08
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1,81	1,80	1,81	1,79	1,61
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,85	0,85	0,88	0,89	0,95
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	17,53	16,97	16,37	15,54	15,65
3.a. Konsumsi Kolektif	13,90	13,50	12,94	12,23	12,29
3.b. Konsumsi Individu	3,62	3,47	3,43	3,31	3,37
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	19,12	19,14	18,90	18,41	18,90
4.a. Bangunan	14,24	14,68	14,45	13,97	13,75
4.b. Non-Bangunan	4,88	4,46	4,45	4,45	5,15
5. Perubahan Inventori	1,84	3,53	5,41	1,09	1,49
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	68,25	55,33	49,57	61,69	54,68
6.a. Barang	68,14	55,23	49,47	61,60	54,61
6.b. Jasa	0,11	0,10	0,10	0,09	0,07
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	0,95	2,04	1,13	1,57	1,83
7.a. Barang	0,26	1,21	0,50	1,01	1,29
7.b. Jasa	0,69	0,84	0,63	0,57	0,54
8. Net Ekspor Antar Daerah	-32,25	-19,94	-16,82	-22,60	-17,00
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ket :

r= Angka diperbaiki *= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Papua Barat 2015-2019 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	5,65	6,70	6,65	5,17	4,99
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	4,73	8,79	7,00	4,56	5,74
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	-3,05	-0,56	4,56	3,73	6,65
1.c. Pakaian	8,59	2,66	3,06	4,73	15,80
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	3,51	8,63	3,55	4,85	11,32
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	5,23	3,07	3,48	3,73	-2,53
1.f. Kesehatan	9,10	5,85	5,14	6,43	-3,88
1.g. Transportasi/Angkutan	13,61	8,33	10,30	7,74	2,98
1.h. Komunikasi	4,90	5,93	7,76	7,23	23,79
1.i. Rekreasi dan Budaya	3,77	6,63	8,47	4,75	10,27
1.j. Pendidikan	2,33	3,24	5,87	5,33	7,89
1.k. Penginapan dan Hotel	4,83	-1,09	7,17	5,62	2,27
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	7,10	4,03	4,71	4,64	-7,43
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1,51	4,95	7,26	7,73	10,37
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	4,36	1,22	0,31	0,84	3,42
3.a. Konsumsi Kolektif	4,38	1,48	-0,30	0,38	3,16
3.b. Konsumsi Individu	4,31	0,21	2,65	2,55	4,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	10,95	4,63	2,68	3,54	5,36
4.a. Bangunan	11,89	7,69	2,39	2,72	1,04
4.b. Non-Bangunan	8,29	-4,30	3,61	6,21	18,90
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	16,34	-15,27	-6,81	32,21	-9,00
6.a. Barang	16,34	-15,29	-6,83	32,30	-8,99
6.b. Jasa	13,70	-1,43	3,30	-9,23	-16,46
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	-15,37	123,95	-42,66	48,48	19,43
7.a. Barang	-50,47	381,51	-57,16	114,67	31,83
7.b. Jasa	15,71	26,29	-21,71	-3,87	-2,49
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB	4,15	4,52	4,02	6,25	2,66

Ket :

r= Angka diperbaiki *= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

**Lampiran 6. Indeks Perkembangan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Papua Barat 2015-2019 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	151,96	170,07	187,81	206,42	225,53
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	147,40	170,83	189,23	207,93	229,57
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	151,81	165,22	183,67	197,66	219,34
1.c. Pakaian	139,44	146,10	152,23	168,35	203,14
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	160,32	178,35	195,03	209,77	238,56
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	149,33	163,27	172,88	182,86	183,63
1.f. Kesehatan	154,15	172,61	193,93	215,95	218,61
1.g. Transportasi/Angkutan	178,35	199,85	226,97	254,20	274,14
1.h. Komunikasi	130,19	139,66	157,59	178,04	222,74
1.i. Rekreasi dan Budaya	134,75	144,65	156,28	169,70	196,10
1.j. Pendidikan	144,24	145,76	160,24	174,05	195,02
1.k. Penginapan dan Hotel	160,20	163,62	179,65	199,56	212,22
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	148,42	152,80	160,63	177,79	169,09
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	182,66	204,51	223,06	243,80	276,01
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	191,44	212,09	219,62	227,28	254,45
3.a. Konsumsi Kolektif	210,52	235,06	241,79	248,76	279,75
3.b. Konsumsi Individu	142,14	152,75	162,32	171,78	189,10
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	191,38	204,15	218,83	236,92	266,10
4.a. Bangunan	193,48	212,00	223,71	238,98	256,53
4.b. Non-Bangunan	185,61	182,53	205,39	231,26	292,43
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	235,44	150,95	171,80	260,17	213,28
6.a. Barang	235,52	150,80	171,68	260,32	213,39
6.b. Jasa	206,59	204,51	211,93	206,06	174,79
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	84,99	179,34	105,30	158,09	193,11
7.a. Barang	32,21	156,79	68,03	149,40	194,41
7.b. Jasa	180,02	219,93	172,41	173,73	190,75
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB	152,04	161,09	173,56	192,55	203,93

Ket :

r= Angka diperbaiki *= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

**Lampiran 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Papua Barat 2015-2019 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	122,98	131,23	139,96	147,19	154,53
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	115,80	125,98	134,80	140,95	149,05
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	111,66	111,03	116,09	120,42	128,43
1.c. Pakaian	130,02	133,48	137,56	144,07	166,84
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	122,52	133,10	137,82	144,51	160,86
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	126,46	130,34	134,88	139,91	136,37
1.f. Kesehatan	128,64	136,18	143,17	152,38	146,46
1.g. Transportasi/Angkutan	143,48	155,43	171,43	184,69	190,19
1.h. Komunikasi	130,92	138,69	149,44	160,25	198,37
1.i. Rekreasi dan Budaya	130,41	139,05	150,83	158,00	174,22
1.j. Pendidikan	122,32	126,28	133,70	140,82	151,93
1.k. Penginapan dan Hotel	123,74	122,39	131,16	138,54	141,69
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	137,47	143,01	149,75	156,69	145,05
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	138,36	145,20	155,74	167,78	185,18
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	135,29	136,94	137,36	138,51	143,26
3.a. Konsumsi Kolektif	148,86	151,07	150,62	151,20	155,97
3.b. Konsumsi Individu	100,23	100,44	103,10	105,73	110,40
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	146,05	152,81	156,90	162,46	171,16
4.a. Bangunan	148,30	159,69	163,52	167,97	169,72
4.b. Non-Bangunan	139,85	133,84	138,67	147,29	175,13
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	230,92	195,67	182,34	241,07	219,36
6.a. Barang	231,19	195,85	182,47	241,40	219,69
6.b. Jasa	132,52	130,63	134,94	122,49	102,33
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	57,92	129,71	74,37	110,43	131,88
7.a. Barang	24,77	119,25	51,09	109,67	144,58
7.b. Jasa	117,62	148,54	116,30	111,79	109,01
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB	126,56	132,28	137,59	146,18	150,07

Ket :

r= Angka diperbaiki *= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

**Lampiran 8. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran
Papua Barat 2015-2019 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	123,56	129,60	134,19	140,24	145,94
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	127,29	135,60	140,38	147,51	154,02
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	135,96	148,80	158,21	164,14	170,79
1.c. Pakaian	107,24	109,46	110,67	116,85	121,76
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	130,85	134,00	141,51	145,16	148,30
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	118,08	125,26	128,18	130,70	134,66
1.f. Kesehatan	119,83	126,76	135,46	141,72	149,26
1.g. Transportasi/Angkutan	124,31	128,58	132,40	137,63	144,14
1.h. Komunikasi	99,44	100,70	105,45	111,10	112,28
1.i. Rekreasi dan Budaya	103,33	104,03	103,61	107,41	112,56
1.j. Pendidikan	117,93	115,43	119,85	123,60	128,37
1.k. Penginapan dan Hotel	129,47	133,69	136,97	144,05	149,78
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	107,96	106,84	107,27	113,47	116,57
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	132,02	140,85	143,23	145,31	149,05
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	141,50	154,88	159,88	164,09	177,62
3.a. Konsumsi Kolektif	141,42	155,60	160,53	164,53	179,35
3.b. Konsumsi Individu	141,82	152,08	157,45	162,47	171,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	131,04	133,60	139,47	145,83	155,46
4.a. Bangunan	130,47	132,76	136,81	142,28	151,15
4.b. Non-Bangunan	132,73	136,38	148,11	157,01	166,98
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	101,96	77,15	94,22	107,92	97,23
6.a. Barang	101,87	77,00	94,09	107,84	97,13
6.b. Jasa	155,90	156,56	157,05	168,23	170,81
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	146,73	138,26	141,58	143,16	146,42
7.a. Barang	130,06	131,48	133,16	136,22	134,46
7.b. Jasa	153,06	148,06	148,25	155,41	174,99
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB	120,14	121,79	126,14	131,72	135,89

Ket :

r= Angka diperbaiki *= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

**Lampiran 9. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran
Papua Barat 2015-2019 (Persen)**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.l.)	6,59	4,89	3,54	4,50	4,07
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	8,14	6,53	3,52	5,08	4,41
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	7,41	9,45	6,32	3,74	4,05
1.c. Pakaian	1,74	2,06	1,10	5,59	4,20
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	6,94	2,41	5,60	2,58	2,16
1.e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	5,74	6,08	2,32	1,97	3,03
1.f. Kesehatan	7,69	5,78	6,86	4,62	5,32
1.g. Transportasi/Angkutan	6,33	3,44	2,97	3,96	4,73
1.h. Komunikasi	-0,02	1,26	4,72	5,35	1,07
1.i. Rekreasi dan Budaya	1,93	0,68	-0,40	3,66	4,80
1.j. Pendidikan	1,29	-2,12	3,84	3,12	3,86
1.k. Penginapan dan Hotel	10,81	3,26	2,45	5,17	3,98
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	0,37	-1,04	0,40	5,78	2,74
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,69	6,68	1,69	1,46	2,57
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	7,29	9,45	3,23	2,63	8,25
3.a. Konsumsi Kolektif	7,32	10,02	3,17	2,49	9,01
3.b. Konsumsi Individu	7,16	7,24	3,53	3,19	5,43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	6,17	1,95	4,39	4,56	6,60
4.a. Bangunan	5,68	1,75	3,05	3,99	6,24
4.b. Non-Bangunan	7,60	2,75	8,60	6,01	6,35
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	-31,72	-24,34	22,13	14,55	-9,91
6.a. Barang	-31,78	-24,42	22,20	14,62	-9,93
6.b. Jasa	11,89	0,43	0,31	7,11	1,53
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	11,55	-5,77	2,40	1,11	2,28
7.a. Barang	8,85	1,10	1,28	2,30	-1,29
7.b. Jasa	7,61	-3,26	0,13	4,83	12,60
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB	3,78	1,37	3,58	4,42	3,17

Ket :

r= Angka diperbaiki *= Angka Sementara

**= Angka sangat sementara

DAFTAR PUSTAKA



1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Statistik Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri*, 1980-1990, Jakarta.
4. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
11. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD*, 1997, Jakarta 2000.
12. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
13. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
14. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
15. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.

16. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
17. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
18. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
19. _____, *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
20. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
21. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
22. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
23. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jln. Trikora Sowi No. 99 Manokwari Papua Barat 98315
Telp. (0986) 2210054 Fax.0986 213038
E-mail:papuabarat@bps.go.id
Homepage:<http://papuabarat.bps.go.id>

ISSN 2089-998X



9 772089 998004